

BAB V
URGENSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN PESANTREN K.H.
ABDURRAHMAN WAHID DI ERA GLOBAL

A. Aktor/Pelaksana Pendidikan Pesantren

Pelaksana pendidikan pesantren yang meliputi kiai, pengasuh atau pendidik dan peserta didik/santri. Kiai merupakan pusat kepemimpinan di pesantren. Kiai dan Pengasuh/pendidik merupakan pihak yang menjalankan pendidikan serta mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik/santri dalam lingkungan pesantren, selain memberikan ilmu juga membimbing serta membentuk kepribadian peserta didik/santri di pesantren. Peserta didik/santri merupakan penerima ilmu dari pendidik/pengasuh serta pihak yang terdidik dalam lingkungan pesantren.

Dalam konteks respon terhadap era global kiai harus mampu melihat kondisi kebutuhan masyarakat masa kini di samping pesan agama yang ingin disampaikan melalui pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Sebagai pemimpin pesantren atau pemimpin pelaksana pendidikan di pesantren, Kiai sebaiknya merumuskan kembali tujuan pesantren yang pro nilai-nilai agama dan pro pada kebutuhan dan tantangan zaman, agar lulusan pesantren juga bisa memiliki modal bagi kehidupannya sendiri di masyarakat, sehingga tidak dikucilkan oleh masyarakat sebagai “orang yang hanya memikirkan akhirat belaka”.

Gus Dur menekankan pentingnya keseimbangan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan angkatan kerja yang dibutuhkan di era global yang dirumuskan melalui pandangannya dalam artikel kurikulum pesantren dan penyediaan angkatan kerja.¹

Pelaksana pendidikan pesantren meliputi kiai, pengasuh atau pendidik dan peserta didik/santri. Kiai merupakan pusat kepemimpinan di pesantren. Kiai dan Pengasuh/pendidik merupakan pihak yang menjalankan pendidikan serta mentransferkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik/santri dalam lingkungan pesantren, selain memberikan ilmu juga membimbing serta membentuk

¹ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai pesantren Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta : LkiS, 2007), hlm 145

kepribadian peserta didik/santri di pesantren. Peserta didik/santri merupakan penerima ilmu dari pendidik/pengasuh serta pihak yang terdidik dalam lingkungan pesantren.

Sebagai pemegang penuh otoritas pelaksanaan pendidikan, Kiai sebaiknya merapikan sistem administrasi pondok pesantren, baik dalam hal kurikulum, penentuan tujuan pendidikan maupun kondisi santri, ustadz dan sarana prasarana pembelajaran di pondok pesantren. Termasuk mempersiapkan kepemimpinan rasional dan tidak pada kharismatik belaka.

Berkaitan dengan guru dan santri/siswa, Gus Dur mengkritik cara belajar yang kurang memadai dengan tidak adanya keharusan untuk membuat kurikulum dalam susunan yang lebih mudahdicernakan dan dikuasai oleh anak didik. Cara pemberian pelajaran tradisional, di mana seorang santri diajari membaca kitab (teks) kata-demi kata dan memahami kalimat yang tersusun dari kata-kata secara harfiah, ternyata tidak mampu meninjau apakah seseorang anak didik tidak membutuhkan pendekatan lain. Pokoknya, kitab wajib telah dibacakan dan diterangkan sesuai dengan kemampuan guru, terserah kepada anak didik untuk menguasainya atau tidak. Evaluasi atas kemampuan anak didik dengan demikian tidak memperoleh tempat yang sesuai dengan kepentingannya dalam sistem pendidikan tradisional.²

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.³ Dari definisi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa asalkan seseorang sedang menempuh suatu jalur, jenjang, dan jenis tertentu baik foemal maupun nonfoemal, maka seseorang tersebut bisa disebut sebagai peserta didik. Istilah peserta didik identik digunakan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Sedangkan dalam lembaga pesantren, peserta didik disebut dengan istilah *santri*.

Secara terminologi, kata santri dalam khasanah kehidupan bangsa Indonesia dan khususnya umat Islam mempunyai dua makna, yaitu *pertama*,

² *Ibid*, hlm. 76

³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, hlm. 4.

menunjuk sekelompok peserta sebuah pendidikan pesantren atau pondok, dan *kedua*, menunjukkan akar kebudayaan sekelompok pemeluk Islam.⁴ Adapun dalam tulisan ini, makna pertama lah yang menjadi pembahasan penulis. Sekelompok peserta dalam makna santri yang pertama mengandung maksud sekelompok peserta didik. Sehingga jelas bahwa santri juga peserta didik, hanya saja istilah santri terkhusus untuk dunia pesantren.

Berdasarkan pada gagasannya, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menginginkan agar peserta didik yang belajar di pesantren adalah peserta didik yang memiliki ilmu agama yang kuat dan sekaligus juga memiliki ilmu umum yang kuat secara seimbang. Gus Dur menginginkan, agar disamping mencetak ahli ilmu agama Islam, pesantren juga mampu mencetak orang yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu komputer, fisika, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.⁵ Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka terlihat jelas bahwa Abdurrahman Wahid menginginkan adanya pesantren yang telah mengikuti Pola V berdasarkan pembagian pola pesantren yang dibuat oleh Sudjoko Prasadjo

Demikian juga dengan santri/peserta didik seharusnya lebih kritis dan membuka diri terhadap segala perubahan yang ada dengan sinergi kiai, ustadz dan santri akan lahir alumni yang berkualitas secara akademik dan sekaligus memiliki kompetensi moral yang baik dan siap menjadi teladan masyarakat.

B. Kurikulum Pendidikan Pesantren

Tujuan isi/kurikulum pendidikan pesantren dalam pandangan Gus Dur adalah diharapkan pesantren mampu melahirkan alumni-alumni yang memiliki kecakapan sesuai dengan dinamika perkembangan global berkaitan dengan ilmu teoritis maupun praktis tanpa harus kehilangan nilai-nilai lama yang baik. Termasuk pendidikan untuk membekali para santri berkaitan dengan penyiapan peserta didik untuk lapangan kerja. ⁶pendidikan pesantren yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melahirkan ulama' yang ilmuwan. Atau ulama dalam pengertian

⁴ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri* (Yogyakarta: TERAS, 2009) hlm. 16

⁵ Abuddin Nata, *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 353.

⁶ *Ibid*, hlm.146-147

yang luas, ulama' yang menguasai ilmu-ilmu agama sekaligus memahami pengetahuan umum sehingga mereka tidak terisolasi dengan dunianya sendiri⁷.

Untuk cita-cita tersebut, Gus Dur mengatakan urgensi dari sebuah rekonstruksi dan pembenahan berbagai komponen dalam pendidikan pondok pesantren, terutama berkaitan dengan dinamisasi isi/subtansi kurikulum yang dipersiapkan untuk ditempuh oleh para santri nantinya. Hal ini adalah sebuah keniscayaan mengingat model pesantren yang hanya menerapkan cara-cara lama sulit sekali bisa melahirkan alumni-alumni yang kompeten di bidang agama sekaligus ilmu-ilmu sains. Oleh karena itu pesantren diharapkan mengembangkan subtansi/isi kurikulumnya dalam rangka penyempurnaan untuk mengikuti tuntutan zaman. Karena sekarang ini orang tua memasukkan anaknya ke pesantren tidak hanya untuk mencari ilmu saja, tetapi juga untuk mencari keterampilan atau ijazah. Oleh karena itu, sebagaimana tesis Azra bahwa perubahan pendidikan Islam, termasuk pesantren dimulai dari sistem dan kelembagaannya yang didasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.⁸

Tujuan pendidikan memberikan kejelasan arah yang akan dituju, target yang bakal dicapai, serta hasil yang bakal diperoleh. Dalam pengertian ini, tujuan pendidikan terkait dengan muatan materi. Oleh karena itu, tujuan pendidikan hanya mungkin dicapai atas dukungan materi yang sengaja dirancang sesuai dan searah dengan tujuan yang akan dicapai. Kemasan materi pendidikan ini lazim disebut dengan kurikulum pendidikan, kurikulum mencakup pengalaman dan aktivitas yang disediakan guna mengembangkan potensi subjek-didik (peserta didik) sebagai makhluk individu dan social. Dengan demikian, materi pendidikan yang terkemas dalam kurikulum juga mencakup pengalaman dan aktivitas di masyarakat.

Kurikulum merupakan pengalaman yang dirancang diberikan kepada si pelajar di bawa bimbingan sekolah. Sehubungan dengan itu, maka proses penyusunannya, dilakukan melalui: 1) pemilihan tujuan; 2) pemilihan isi; 3)

⁷ Mujamil Qomar, *Pesantren dari Dinamisasi Metodologi menuju Demokratisasi Institusi*. (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 6.

⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam tradisi dan Modernisasi Menuju milenium baru*, (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 200), hlm. 121

penyusunan isi; dan penilaian yang didalamnya terancang secara sistematis dan terarah serta berdasarkan pertimbangan.

Penyusunan kurikulum pondok pesantren haruslah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam ini mengandung tiga dimensi nilai, yakni:

1. Dimensi yang mengandung nilai yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di dunia.
2. Dimensi yang mengandung nilai untuk mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan.
3. Dimensi yang mengandung nilai-nilai yang dapat memadukan antara kepentingan hidup duniawi dan ukhrawi.

Sebagai komponen (faktor) dari sistem pendidikan, maka bagaimanapun proses penyusunan kurikulum tak dapat dilepaskan dari landasan filsafat pendidikan yang mendasarinya. Kurikulum sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam harus mengandung muatan nilai-nilai ajaran Islam. Disesuaikan dengan sistem pendidikan yang terdiri dari seperangkat cita-cita kemasyarakatan, norma dan nilai-nilai tertentu yang didasarkan pada pandangan hidup dan kebudayaan tertentu.

Penjelasan ini mengisyaratkan akan adanya hubungan yang terintegrasi antara filsafat pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam, serta kurikulum pendidikan Islam. Ketiganya menyatu dari rumusan yang mengacu ke sumber ajaran Islam, serta pemikiran para intelektual Muslim. Mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam baik sebagai sistem norma dan peradaban. Sistem norma yang terkait dengan pembentukan manusia yang berakhlak mulia, serta peradaban yang berhubungan dengan pembentukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Keduanya diwujudkan dalam sosok kepribadian teladan (*al-akhlaq al-karimah*) yang mampu member rahmat bagi seluruh alam (*rahmat li al-'alamin*).

Sejalan dengan itu, maka materi pendidikan yang terkemas dalam kurikulum meliputi pembentukan nilai-nilai pengabdian kepada Allah, kemampuan profesional, dan bakti kepada masyarakat. Secara garis besarnya dirumuskan menjadi pembentukan kesalehan individu (*'abid*), kualitas sumber daya individu (*'alim*), dan kesalehan social (*'amal shaleh*). Materi pendidikan

tertuju pada upaya pembentukan sosok kepribadian Muslim yang *'abid* (taat), *'alim* (intelektual) yang *'amil* (professional), kepribadian yang memiliki wawasan ketuhanan, kedirian, kesosialan, kemanusiaan, dan kesemestaan.

Pesantren dilihat dari segi kurikulumnya terbagi menjadi tiga model atau tipe, yaitu :

- 1) Pesantren salafiyah atau tradisional, yaitu pesantren yang sistem pendidikannya semata-mata berdasarkan pada pola-pola lama atau klasik. Jadwal dan kitab yang dikaji tidak mempunyai aturan yang baku, dan sistem pengajarannya masih menggunakan sistem lama, seperti sorogan, bandunganwetonan dan sebagainya.
- 2) Pesantren semi modern, yaitu pesantren yang sudah mengadopsi kurikulum sekolah, manajemen dan kurikulum sudah tertata rapi, seperti pembagian kelas. Ustadz yang mengajarnya pun dibagi sedemikian rupa, sistem pembelajarannya pun tidak jauh beda dengan sistem yang ada di sekolah formal. Pada pesantren ini, pengelolaan pendidikan tidak dipegang secara penuh oleh kyai, tetapi diambil alih oleh pengurus yang terkotak-kotak sesuai dengan bidang-bidang, meskipun kebijakan tertinggi masih dipegang oleh kyai.
- 3) Pesantren modern. yaitu pesantren yang kurikulumnya dan manajemen pembelajarannya mengadopsi kurikulum pemerintah/formal secara total. Materi pelajaran yang disampaikan oleh sekolah formal juga disampaikan oleh pesantren modern, kyai tidak lagi memegang otoritas penuh, namun hanya sebatas penasehat atau pimpinan yayasan yang juga tunduk pada aturan pemerintah.⁹

Perbedaan-perbedaan pesantren di atas menunjukkan adanya pergeseran-pergeseran pada sistem pendidikan dan kurikulum pesantren. Karena pada awal kemunculannya, pesantren hanya mempunyai sistem pendidikan tunggal, yaitu tradisional. Pergeseran-pergeseran kurikulum pesantren sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mewajibkan pendidikan formal selama sembilan

⁹ Ismail SM, *et.al*, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 149-150

tahun. Hal ini membuat pesantren mau tidak mau juga harus memberikan kelonggaran kepada santri untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Selain itu ketakutanketakutan rasional positivistik juga sangat mempengaruhi pergeseran kurikulum pesantren, dimana rasional positivistik selalu mengukur segala sesuatu dengan materi.

Pada umumnya pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, materi pembelajarannya lebih mengutamakan pelajaran agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab klasik, seperti tauhid, hadis, tafsir, fiqih dan sejenisnya. Kurikulum didasarkan pada tingkat kemudahan dan kompleksitas kitab-kitab yang dipelajari, mulai dari tingkat awal, menengah dan lanjut.¹⁰

Dalam perkembangannya. hampir setiap pesantren telah melakukan pembaharuan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Sifatnya bervariasi, ada pesantren yang memasukan pendidikan 30% agama dan 70% umum, adapula yang sebaliknya, yakni 80% agama dan sisanya pelajaran umum.

Dalam teori sosial, hal-hal yang dapat menjadikan pergeseran dan perubahan yang terjadi di masyarakat setidaknya sebagai berikut;

- 1) Ideologi normatif, orientasi ideologis menuntut sistem pendidikan memiliki tujuan yang lebih luas, serta membentuk wawasan peserta didik. Dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai instrument penting dalam pembinaan *nation building*.
- 2) Mobilisasi politik, pergeseran orientasi politik menuntut dinamisasi tujuan pendidikan.
- 3) Mobilisasi ekonomi, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang handal menuntut sistem pendidikan untuk mempersiapkan anak didik mejadi SDM yang unggul agar dapat mengisi pos-pos kerja yang tidak bias dimasuki dengan hanya mengandalkan model pendidikan Islam klasik.
- 4) Mobilisasi sosial, tingginya mobilitas sosial dalam alam modern menuntut pendidikan untuk memberikan akses yang lebih bagi peningkatan sosial.

¹⁰ Amirudin Nahrawi, *Pembaharuan...op.cit.*, hlm. 28

5) Mobilisasi kultural, modernisasi menimbulkan perubahan-perubahan sosial.¹¹

Jika melihat dari kelima teori perubahan sosial di atas maka sangat jelas bahwa pendidikan Islam termasuk di dalamnya pesantren memang harus melakukan dinamisasi substansi/isi pendidikan agar mampu menjawab kelima tantangan proses perubahan yang terjadi. Tujuan pengembangan pesantren adalah integrasi antara pengetahuan agama dan non agama, sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki kepribadian yang utuh dan bulat, yang menggabungkan dalam dirinya unsur-unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang.¹²

Dengan pernyataan pernyataan di atas Gus Dur ingin menegaskan bahwa dalam konsep pendidikan Islam, termasuk di dalamnya pondok pesantren tak ada paradigma dikotomi ilmu umum dan agama, ilmu dunia ataupun akhirat melainkan semua ilmu berasal dari Allah dan selama ilmu itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia adalah suatu langkah yang dibenarkan dalam Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal tujuan disyariatkannya hukum dalam syariat.

Selanjutnya untuk pelaksanaan dinamisasi kurikulum pesantren penting kiranya pesantren mengembangkan sebuah perencanaan terstruktur untuk kemajuan pendidikannya, Hal pertama dari para pengasuh adalah pengetahuan tentang aspek-aspek pemahaman terhadap kurikulum Pendidikan Pesantren Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu *curriculum* yang berarti "bahan pengajaran": yang berasal dari kata dasar "*currere*" yang artinya berlari cepat dan tergesa-gesa.¹³

Ada pula yang mengartikan "perlombaan" (*race cause*). Pendapat lain, kurikulum berasal dari bahasa Perancis "courier" yang berarti berlari¹⁴ Makna lainnya disebutkan bahwa kurikulum diartikan kumpulan subjek yang diajarkan di

¹¹ M. Dian Nafi', *et.al. Praksis Pembelajaran Pesantren*, (Yogyakarta: Forum Pesantren 2007), hlm. 49.

¹² Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan...op.cit.*, hlm.137.

¹³ Omar Mohammad al-Toumyal-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam, Terj. Hassan Langgulung*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 519-522.

¹⁴ Omar Mohammad al-Toumyal-Syaibany, *Falsafah...op.cit.*, hlm. 522

sekolah, atau arah suatu proses belajar.¹⁵ Ada pula pendapat kurikulum berasal dari bahasa Inggris "Curriculum" berarti "susunan rencana pelajaran".¹⁶

Sebagaimana dalam Wina Sanjaya, istilah kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata curir dan curere. Pada waktu itu kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya dengan tempat berpacu atau tempat berlari dari mulai start dan finish. Namun selanjutnya istilah itu digunakan dalam dunia pendidikan.¹⁷

Sedangkan dari penelusuran konsep, pada dasarnya kurikulum memiliki tiga dimensi pengertian. yakni kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Saylor, Alexander dan Lewis, sebagaimana Wina Sanjaya, pengertian jumlah mata pelajaran harus ditempuh oleh peserta didik, merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan.¹⁸

Menurut Sukmadinata, kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah atau di lembaga pendidikan lainnya. Terintegrasi didalamnya filsafat, nilai-nilai, pengetahuan dan perbuatan pendidikan.¹⁹ Dengan kurikulum. manajemen sekolah dapat menentukan kebutuhan kebutuhan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dalam tingkatannya. Kurikulum harus menyentuh aspek masa yang akan datang tiga unsur pembentuk esensial manusia yaitu qalb, akal. dan fisik:

¹⁵ A. Malik, *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren*. (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2008), hlm. 25.

¹⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet vii, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 543.

¹⁷ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 3. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 19: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".

¹⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum ...op.cit.*, hlm. 4.

¹⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 150.

dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan lingkungan masyarakat sekitar.

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kurikulum adalah sebagai berikut:

- 1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
- 2) Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab
- 3) Kooperatif. agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait.
- 4) Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber: daya tenaga, biaya, dan waktu.
- 5) Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.²⁰

Menurut Sukmadinata²¹, komponen kurikulum meliputi empat hal pokok yang saling berkaitan, yaitu:

- 1) Tujuan kurikulum

²⁰ Dadang Suhardan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, hlm. 102

Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal: (1) perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat, (2) didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah kepada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara.²² Sementara tujuan pendidikan nasional; seperti menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.²³

Di samping itu, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan nasional bertujuan menciptakan manusia berakhlak mulia, beriman, bertaqwa dan meyakini sebagai kebenaran dan membuktikan kebenaran itu dengan akal, rasa dan karsa pada setiap perbuatan dan tingkah lakunya sehari-hari.

Tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam secara utuh berada pada posisi setara yang tidak perlu dipertentangkan. Kedua tujuan tersebut dapat dijabarkan menjadi tujuan institusional, tujuan pengajaran/kurikuler, dan tujuan instruksional.²⁴

2) Isi atau materi kurikulum

Untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan diperlukan bahan ajar. Bahan ajar tersusun atas berbagai topik dan subtopik tertentu. Tiap topik dan subtopik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tersusun dalam rancangan tertentu yang membentuk rancangan bahan ajar.²⁵

²² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan...op.cit.*, hlm. 103.

²³ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003

²⁴ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 14.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan...op.cit.*, hlm. 105.

Bahan ajar yang dipelajari siswa sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada buku teks pelajaran. Perlu pula penggunaan dan mengembangkan berbagai bahan ajar melalui media dan sumber belajar yang sesuai dengan topik bahasan. Demikian juga dengan keterlibatan masyarakat sekelilingnya (*community based experiential learning*) harus mulai dikembangkan secara strategis supaya menghasilkan kemampuan anak didik yang terintegrasi dengan lingkungan.

Jadi usaha dinamisasi isi/subtansi kurikulum di sini lebih terletak pada usaha untuk mengadakan revaluasi (penelaahan ulang) dan reaktualisasi terhadap berbagai tantangan perkembangan zaman dan tuntutan dunia usaha maupun industri. Untuk itu pesantren harus terbuka terhadap segala bentuk tantangan dan mengusahakan model kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan dunia global.

Selanjutnya dalam beberapa penelitian terhadap pesantren ditemukan bahwa pesantren mempunyai kewenangan tersendiri dalam menyusun dan mengembangkan kurikulumnya. Menurut penelitian Lukens-Bull dalam bukunya Abdullah Aly, secara umum kurikulum pesantren dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu; Pendidikan Agama, pengalaman dan pendidikan moral, sekolah dan pendidikan umum serta, ketrampilan dan kursus.²⁶

Pertama, kurikulum berbentuk pendidikan Agama Islam. Di dalam dunia pesantren, kegiatan belajar pendidikan Agama Islam lazim disebut sebagai *ngaji* atau pengajian. Kegiatan *ngaji* dipesantren pada praktiknya dibedakan menjadi dua tingkatan. Pada tingkatan awal ngaji sangatlah sederhana, yaitu para santri belajar membaca teks-teks Arab, terutama sekali Al-Qur'an. Tingkatan ini dianggap sebagai usaha minimal dari pendidikan agama yang harus dikuasai oleh para santri. Tingkatan berikutnya adalah para santri memilih kitab-kitab islam klasik dan mempelajarinya dibawah bimbingan kiai. Adapun kitab-kitab yang dijadikan bahan untuk *ngaji* meliputi bidang ilmu: fikih, aqidah atau tauhid, nahwu, sharaf, balaghah, hadits, tasawuf, akhlak, ibadah-ibadah seperti sholat doa, dan wirid. Dalam penelitian Martin Van Bruinessen, ada 900 kitab kuning

²⁶ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikulturalisme di Pesantren; Telaah Kurikulum Pondok Pesantren Islam Assalam Surakarta* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 184

dipesantren. Hampir 500 kitab-kitab tersebut ditulis oleh ulama asia tenggara dengan bahasa yang beragam; bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Indonesia, dan Aceh.²⁷ Kitab kuning dalam dunia pesantren mempunyai posisi yang signifikan selain dari kharisma kiai itu sendiri. Dan kitab kuning itu sendiri dijadikan referensi dan buku pegangan dalam tiap-tiap pesantren, dan kurikulum sebagai sistem pendidikan dalam sebuah pesantren tersebut.

Kedua, kurikulum berbentuk pengalaman dan pendidikan moral. Kegiatan keagamaan yang paling terkenal di dunia pesantren adalah kesalehan dan komitmen para santri terhadap lima rukun Islam. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran para santri untuk mengamalkan nilai-nilai moral yang di ajarkan pada saat *ngaji*. Adapun nilai-nilai moral yang ditekankan dipesantren adalah persaudaraan Islam, keikhlasan, kesederhanaan dan kesaudaraan Islam.

Ketiga, kurikulum berbentuk sekolah dan pendidikan umum. Pesantren memberlakukan kurikulum sekolah mengacu kepada pendidikan nasional yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum Madrasah mengacu kepada pendidikan Agama yang diberlakukan oleh Departemen Agama.

Keempat, kurikulum berbentuk ketrampilan dan kursus. Pesantren memberlakukan kurikulum yang berbentuk ketrampilan dan kursus secara terencana dan terprogram melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kursus yang populer dipesantren adalah bahasa inggris, computer, setir mobil, reparasi sepeda motor, dan lain sebagainya. Kurikulum seperti ini diberlakukan di pesantren karena mempunyai dua alasan, yaitu alasan politis dan promosi. Dari segi politis, pesantren yang memberikan pendidikan ketrampilan dan kursus kepada para santrinya berarti merespon seruan pemerintah untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berarti hubungan antara pesantren dengan pemerintah cukup harmonis. Sementara itu dari segi promosi terjadi peningkatan jumlah santri yang memiliki pesantren-pesantren modern dan terpadu, dengan alasan adanya pendidikan ketrampilan dan kursus di dalamnya.

²⁷ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 134

Kurikulum yang terintegrasi diasumsikan akan mampu menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman penting mengenai nilai dan pegangan hidup di masa depan serta membantu peserta didik/santri dalam mempersiapkan kebutuhan dan pengalaman hidup yang esensial untuk menghadapi dinamika kehidupan.²⁸

Kurikulum terintegrasi sengaja dirancang agar proses pendidikan benar-benar memehuni maksud yang dikehendaki, yang meniadakan batas-batas antar subjek mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit yang berkeseluruhan. Dengan pelajaran yang menyajikan fakta yang tidak terlepas antara satu dengan yang lain di harapkan akan mampu membentuk kepribadian santri dan peserta didik yang integral, dan selaras dengan kehidupan sekitarnya.

Implementasi integrated curriculum mendasarkan diri pada belajar yang berpusat pada diri anak (*student centered/ inquiry*), bersifat *Life Cerncered* yaitu langsung berhubungan dengan aspek kehidupan, dan di hadapkan pada situasi yang mengandung problem (*Problem Posing*), memajukan perkembangan sosial, dan direncanakan bersama anatar guru dengan murid. Untuk mencapai maksud tersebut harus ada hubungan dialogis dan kritis anatar guru dan murid. Begitu pula, harus aada penguatan terintegrasi dalam subjek mata pelajaran yang memungkinkan perkembangan sikap kritis siswa, seperti; sejarah, filsafat, dan bahasa.²⁹

Dengan metode yang seperti ini diharapkan peserta didik bisa lebih memiliki kebebasan mengembangkan seluruh kekuatan intelegensinya untuk memahami seacara kritis. Demikian juga evaluasi yang diberikan bukan model evaluasi yang membuat peserta didik merasa didikte dan harus mmenghafalkan sesuatu tanpa kesempatan memberikan pendapat dan argumanya sendiri.

Integrated kurikulum membidik penguasaan peserta didik sesuai dengan kompetensi yang harus di kauasai peserta didik sesuai dengan pemikiran Gordon yang meliputi; (1) *Knowledge* (pengetahuan), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif; (2) *Understanding*, artinya kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki

²⁸ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta; Lista Farista Putra, 2005), hlm 59

²⁹ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen...op.cit.*, hlm, 60.

individ; (3) *skill*, artinya sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya; (4) *Value*, artinya suatu standar perilaku yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu ke dalam diri seseorang; (5) *Attitude*, artinya perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar; dan , (6) *Interest*, artinya kecenderungan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan.³⁰

C. Bidang Metodologi Pendidikan Pesantren

Metodologi pembelajaran yang terkandung di dalamnya strategi dan teknik pembelajaran yang berkaitan dengan siasat, cara atau sistem penyampaian isi kurikulum. Menurut Rusman, bahwa pembelajaran di dalam kelas merupakan sarana untuk melaksanakan dan menguji kurikulum; yang di dalam kegiatan tersebut semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji untuk mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata (*actual curriculum-curriculum in action*).³¹

Metode Pembelajaran pesantren pada mulanya populer menggunakan metodik-didaktif dalam bentuk *sorogan*, *bandongan*, *halaqahdah* dan hafalan. Menurut Mastuhu³², pembaharuan metode pembelajaran mulai terjadi sekitar awal abad ke-20 atau tepatnya sekitar tahun 1970-an, dari pola sorogan berubah menjadi sistem klasikal, tidak hanya itu, beberapa pendidikan keterampilan juga mulai masuk ke dunia pesantren, seperti bertani, berternak, kerajinan tangan mulai akrab dikehidupan santri sehari-hari. Ini dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan atau orientasi santri dari pandangan hidup yang selalu berpandangan ukhrowi, supaya seimbang dengan kehidupan duniawi.³³

Hal tersebut di atas, bahwa antara metode yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat dan mempunyai kelemahan serta kelebihan masing-masing, sehingga pondok-pondok pesantren sampai sekarang masih mempertahankan metode tersebut, dan itu menjadi lambing supremasi serta ciri khas metode pengajaran di pondok pesantren Metode pembelajaran tersebut tentunya belum

³⁰ Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen...op.cit.*, hlm, 61.

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan ...op.cit.*, hlm. 150.

³² Mastuhu, *Dinamika...op.cit.*, hlm. 131.

³³ Amirudin Nahrawi, *Pembaharuan...op.cit.*, hlm. 28.

mewakili keseluruhan dari metode pembelajaran yang ada di pondok pesantren, tetapi setidaknya paling banyak diterapkan di lembaga pendidikan pesantren.

Dalam prakteknya pendidikan pesantren juga masih banyak yang menggunakan metode tradisional yaitu dengan cara pengajaran yang lebih menekankan pada penangkapan harfiah atas suatu teks dan ciri utama ini masih banyak dipertahankan. Sebagaimana dapat dilihat pada mayoritas sistem pendidikan pesantren dewasa ini. Dengan demikian, pemberian pengajaran di pesantren masih bersifat non klasikal (tidak didasarkan pada unit mata pelajaran).³⁴

Dinamisasi yang harus dilakukan pesantren diantaranya adalah memperbaharui metode pendidikan yang selama ini dikembangkan. Karena selama ini metode yang digunakan pesantren lebih menekankan pada metode induksi. Pesantren mengembangkan kajian-kajian partikular terlebih dahulu. Setelah penguasaan memadai baru ditambahkan wilayah kajian yang menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar. Dengan mengembangkan kajian-kajian yang menjadi alat bantu dalam memahami ajaran dasar terlebih dahulu baru kemudian diimplementasikan dalam kajian partikular seperti fiqih dan perkembangan dinamika modern. Metode ini agaknya lebih bias mengembangkan penalaran dan kreatifitas para santri di pesantren.

Langkah transformatif yang dimaksudkan di sini adalah langkah-langkah yang tidak hanya sekedar merubah bentuk dari aslinya menjadi bentuk yang baru tapi lebih penting justru terletak pada nilai-nilai positif konstruktif dari perubahan itu yaitu dari model pengajaran yang tradisional (klasikal-formal) dengan tidak meninggalkan ciri khas pesantren dan dari model pembelajaran yang membelenggu santri menjadi emansipatoris

Pembelajaran merupakan sebuah sistem dengan komponen-komponen yang saling berkaitan untuk melakukan suatu sinergi, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Robert Heinich dkk membuat kategori sistem pembelajaran ke dalam beberapa tipe, yaitu:³⁵

³⁴ Abdurrahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta : Dharma Bhakti,tt) hlm. 73

³⁵ Benny A. Pribadi, *Model Desain...*, 30-31.

- a. pembelajaran dikelas (tatap muka),
- b. pembelajaran dengan menggunakan siaran radio dan televisi,
- c. pembelajarn mandiri dengan menggunakan paket bahan ajar pada sistem pembelajarn jarak jauh,
- d. pembelajaran berbasis *web*,
- e. aktivitas belajar di laboratorium dan *workshop*,
- f. seminar, simposium dan studi lapangan (*field study*), dan
- g. pembelajaran dengan memanfaatkan komputer (*multimedia*) dan telekonferensi.

Dalam sistem pembelajaran, *output* dari sebuah komponen merupakan *input* bagi komponen yang lain. Komponen-komponen dari sebuah sistem pembelajaran yang berinterfungsi meliputi siswa, tujuan, metode, media, strategi pembelajaran, evaluasi, dan umpan balik.

- 1) Siswa, merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran di sekolah karena siswa merupakan subyek dari proses dan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran harus menjadi sebuah aktivitas yang berfokus pada siswa-*learner centered*. Sistem pembelajaran yang efektif dan efisien mempertimbangkan komponen karakteristik siswa. Hal ini mengharuskan perancang program pembelajaran perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang karakteristik siswa yang akan menempuh program pembelajaran.
- 2) Tujuan, merupakan sesuatu yang mengarahkan semua proses yang berlangsung dalam sebuah sistem. Tujuan dari penyelenggaraan sistem pembelajaran adalah untuk memfasilitasi siswa agar memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan dalam beragam aktivitas kehidupan.
- 3) Metode pembelajaran, merupakan proses atau prosedur yang digunakan oleh guru atau instruktur untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Metode pembelajaran adalah cara-cara yang mesti

ditempuh dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³⁶

- 4) Media, merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas belajar. Media dapat diartikan sebagai “perantara” yang menghubungkan antara guru atau instruktur dengan siswa. Media dapat digunakan untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik.
- 5) Strategi pembelajaran, yaitu cara-cara spesifik yang dapat dilakukan oleh individu untuk membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Strategi dapat juga diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁷ Guru atau instruktur perlu melakukan upaya kreatif dalam menggunakan strategi pembelajaran.
- 6) Evaluasi, dapat diklasifikasikan menjadi evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pembelajaran. Keduanya memegang peranan yang sangat penting dalam implementasi sistem pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk menilai seberapa jauh tujuan sebuah sistem pembelajaran dapat tercapai.

Analisa dan pemahaman terhadap komponen di atas perlu dilakukan untuk mengadapi perkembangan metode yang diterapkan dalam lembaga pendidikan pada umumnya, berbagai metode pesantren yang bersifat tradisional itu di pandang perlu disempurnakan. artinya, kita perlu melakukan penelitian yang seksama terhadap efektivitas, efisiensi, dan relevansi metode-metode tersebut untuk menemukan kelemahan dan keunggulannya segi kelemahannya di perbaiki sedang segi keunggulannya dipertahankan. Banyak tokoh-tokoh dan pengelola pesantren sebagai merasakan kelemahan ini, sehingga mereka berfikir dan menganjurkan adanya upaya kajian ulang terhadap pengajian di pesantren.

³⁶ Departemen Agama R.I, *Pola Pembelajaran di Pesantren* (Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2003), 7.

³⁷ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2006), 124.

Seruan yang sama disampaikan Abdurrahman Wahid yang diungkapkan kembali oleh Bruinessen.³⁸ Kiyai dan ustadz perlu melakukan perkembangan dan pembenahan ke dalam secara kontinyu, baik metodologi, teknologi, dan aktivitas pendidikan agar mampu berkompetisi atau paling tidak mampu mengejar ketinggalan dengan berpedoman pada: memegang yang lama dan yang masih tetap layak serta mengambil yang baru tetapi yang lebih baik.

Penyerapan metode baru sebagai tambahan metode yang bersifat tradisional tidak pernah seragam. Para peneliti menemukan perbedaan pemakaian metode di kalangan pesantren Dhofier merinci atas metode *sorogan*, *bandongan*, (*wetonan*), musyawarah (seminar), tanya jawab, dan metode diskusi. Sindu Galba menyebut metode *sorogan*, *sorogan* klasikal, *bandongan*, ceramah; dan metode latihan tulis-baca. Prinsip metode yang berbeda ini sebagai akibat kecenderungan kiyai sebagai refleksi otonominya.

Oleh karena itu, pengamatan terhadap pesantren yang berbeda akan menemukan penerapan metode. Pembagian metode yang sederhana tersebut merupakan hasil pengamatan sepintas. Operatifitas yang cermat terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di pesantren akan menemukan perubahan bentuk metode pendidikan yang amat beragam baik yang sering diterapkan maupun terbatas pada saat tertentu. Keragaman ini mungkin tidak kurang dari jumlah metode pendidikan yang ditempuh lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti SD, SLTP, dan SMU. Penyesuaian secara serius melalui penambahan secara horizontal, sehingga makin melunturkan batas-batasnya dengan sistem pengajaran model barat. Pimpinan-pimpinan pesantren yang tergabung dalam *rabithat ma'ahit* telah mempraktikkan metode-metode yang sangat beragam, kemudian mereka menetapkannya dalam muktamar ke-1 pada 1959, yang meliputi: metode tanya jawab, diskusi, *imlak muthola'ah / recital* proyek, dialog, karya wisata, hafalan / ferbalisme, sosio drama, widyawisata, *problem solving*, pemberian

³⁸ Martin Van Bruinessen, NU Tradisi relasi-relasi kuasa Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 185

situasi, pembiasaan atau habituasi, dramatisasi (percontohan tingkah laku), *rainforcement*, septimulus-respons dan sistem modul (meskipun agak sulit).³⁹

Metode proyek, karya wisata, sosiudrama, wibya wisata (study banding atau sdatitour) *raiforcement* (penguatan) modul terasa asing kedengarannya, padahal kiyai pesantren menerapkannya pada beberapa dasa warsa belakang ini sebagai upaya inofasi pendidikannya. Dibanding metode-metode utama *sorogan* dan *bandongan*, memang kelima macam metode tersebut jarang dipakai. Metode karya wisata sebagai metode yang tampaknya paling asing bagi pesantren kecuali jiarah makam Wali Songo ternyata menjadi bagian dari rangkaian metode lainnya. Saefudin Zuhri mengabarkan bahwa “dibeberapa pesantren, santri tidak hanya menyibukan diri dalam mengaji dan belajar. Ada juga saat untuk rekreasi.”⁴⁰

Metode ini sebagai sselingan terhadap metode lainya sehingga relatif jarang dipakai, tidak ditentukan secara reguler dan tidak berkesinambungan. Metode karya wisata seccara kebetulan dipakai ketika pesantren mengadakan rekreasi yang tidak dijadwalkan dalam kalender akademiknya. Sedang penerapan metode ini disekolah-sekolah umum telah lama dibiasakan terutama menjelang perpisahan bagi siswa kelas akhir.

Metode diskusi merupakan metode yang menjadi andalan proses belajar mengajar diperguruan tinggi metode ini juga diterapkan di pesantren. Diskusi membuka kesempatan timbulnya pemikiran yang riberal dengan dasar argumentasi ilmiah. Melalui metode ini eksklusivisme pemikiran dipesantren dapat dibongkar, feodalisme pengajaran dari kiyai dan ustadt memperoleh perlawanan, sikap toleran dan seportif terhadap munculnya ide-ide baru menemukan penyaluran dan mendorong timbulnya daya kritik yang tajam. Oleh karena itu, logis bila penerapan metode diskusi berlangsung konduksi hanya pada pesantren-pesantren modern karena pribadi kiyainya yang dinamis dan toleran. Rahadjo menuturkann bahwa dipesantren-dipesantren yang ada sekarang, diskusi dalam proses belajar mengajar masih sangat terbatas perkembangannya. Tetapi

³⁹ Departemen Agama, StandarisasinPengajaran Agama di Pondok Pesantren, Jakarta: tp, hlm. 83-84 .

⁴⁰ Saefudin Zuhri, Guruku Orang-Orang Pesantren, Edisi Baru (Yogyakarta: 2015), hlm. 50.

bentuk diskusi semacam ini bisa berkembang baik di pesantren tebu ireng pebelan, atau gontor pada pesantren tegal rejo atau Lirboyo kemungkinan ini masih jauh.

Akhir-akhir ini bahkan ada juga pesantren yang menerapkan metode seminar. Seminar dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari dalam maupun luar. Pesantren Al-Hikam Malang, pimpinan kiyai Hasim Muzadi maupun pesantren Nurul Jaddid pimpinan kiyai A. Wahid Zaeni cukup sering mengadakan seminar dengan narasumber dari luar, sehingga mengubah kesan tentang metodik di pesantren.

Jadi dinamisasi metode pendidikan pesantren tersebut mulai dari *sorogan*, *bandongan (wetonan)*, ceramah, *muhawaroh*, *mudzakaroh*, *majlis ta'lim*, hingga perkembangan terakhir yang cenderung menerapkan diskusi dan seminar menunjukkan bahwa kendati secara perlahan-lahan, telah ada benih-benih upaya yang menyampaikan pelajaran secara modern sebagai terjadi di sekolah sekuler.

Tampaknya metode pengajaran yang dilakukan di pesantren cenderung mempertahankan metode-metode yang telah ada dan yang telah dilakukan selama ini tanpa evaluasi terhadap efektifitas dan efesienasinya. Memang kultur pesantren sering kali beranggapan bahwa suatu yang sudah ada (termasuk metode pengajarannya) dianggap baik bahkan terbaik sehingga harus ditambah apalagi kemudian di landasi selogan *al-muhaffazhah 'ala al-qadim al-shalih* (menjaga keadaan yang lama yang baik). Maka ada kecenderungan monoton. Metode pengajaran yang cenderung dan menggunakan pendekatan doktrinal mesti di transformasikan dan diperkaya dengan berbagai metode instruksional modern agar dapat membuka eksplorasi cakrawala pemikiran para santrinya. Pengembangan pemikiran merupakan salah satu kelemahan yang dirasakan pesantren selama ini, kendatipun hanya terdapat bidang-bidang yang digaji, apalagi terhadap bidang-bidang lain yang terkait.

Kondisi ini terjadi lantaran metodologinya. Mastuhu menyatakan “meskipun secara kultural memiliki konsep asiologi ilmu dan kaya dengan hazanah ilmu tetap pesantren memiliki kelemahan yang sangat mendasar dalam metodologi”. Di samping metodologi, pesantren lemah pada tingkat

pengembangan ilmu. Kebanyakan pesantren hanya mengajarkan ilmu agama dalam arti *transfer of knowledgen* tanpa upaya lebih lanjut dengan mengembangkan ilmu. ⁴¹Metodologi dan pengembangan ilmu merupakan dua hal yang terkait bahkan tidak bisa di pisahkan. Metodologi memiliki misi mengembangkan ilmu, sebaliknya, pengembangan ilmu tidak akan terjadi tanpa bekal metodologi. Maka seseorang yang tidak memiliki kemampuan metodologis sulit di ajak maju dan mengembangkan sesuatu.

Oleh karena itu, pesantren perlu mengembangkan metodologi yang shalih agar menjadi *aslah* dan dinamika keilmuan berikut kebekan social para santri, sehingga mereka mampu mengantisipasi dan menganalisis segala perubahan yang sedang dan akan terjadi. pemikiran analitis (*nadhariyah*) di pandang sebagai salah satu kekurangan pesantren, mengharuskan wujudnya sholusi dengan memperkaya basis metodologi keilmuan (*manhaj al-fikr*), selain basis materi (*maddah*) yang selama ini di tekuninya.

D. Kepemimpinan dan Kelembagaan Pondok Pesantren

Kiai merupakan tumpuan pesantren. Berkat tempaan pengalamannya mendirikan pesantren sebagai realisasi cita-cita kiai, akhirnya timbullah corak kepemimpinan yang bersifat pribadi. Yang berlandaskan pada penerimaan masyarakat sekitar dan warga pesantrennya secara mutlak. Karena itu ciri utama penampilan kepemimpinan kiai adalah watak kharismatik yang dimilikinya. ⁴²

Pada dasarnya kepemimpinan kiai di pondok pesantren merupakan kepemimpinan yang berkarakter dan memiliki ciri utama kekarismatikan. Watak karismatik timbul biasanya disebabkan oleh kedalaman ilmu dan kemampuan menguasai permasalahan-pemmasalahan yang menjadi hajat santri di pesantren maupun masyarakat sekitar. Sehingga kiai menjadi sosok yang kuat, cakap, dan memilikin pancaran kepribadian sebagai seorang pemimpin. Thoha menyebut kiai sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *sosial changer* (perombak

⁴¹ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 151

⁴² Abdurrahman Wahid, dalam kepemimpinan dalam pengembangan pesantren, juga dalam Mustajab, *Masa Depan Pesantren, telaah atas model kepemimpinan dan manajemen Pesantren salaf*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), hlm. 47

masyarakat) dalam masyarakat yang memiliki keunggulan dibanding masyarakat lain di sekitar pesantren. Legitimasi kiai diperoleh penilaian masyarakat karena keahlian keagamaannya bahkan kesaktiannya bila memiliki dan sering kali hal tersebut di nilaikarena keturunan.⁴³

Selama ini kepemimpinan kiai dalam pesantren pada umumnya bercorak alami. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya bentuk yang teratur dan tetap dalam suksesi kepemimpinan dalam pesantren. Dengan kata lain bahwa kepemimpinan kiai dalam pesantren selama ini berdasarkan kharisma. Sehingga ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan dalam kepemimpinan kiai seperti ini.

Gus Dur mengatakan bahwa pesantren sebenarnya membutuhkan model kepemimpinan yang lebih direncanakan dan dipersiapkan, yakni model kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan kontemporer dan masa depan. Dengan kata lain, kepemimpinan pesantren ke depan ialah kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan antara kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan yang direncanakan dan dipersiapkan. Gaya kepemimpinan seperti ini memiliki “karisma” *skill* manajerial yang tangguh, bukan karisma alamiah semata.

Penulis berpendapat bahwa Abdurrahman Wahid ingin menghilangkan dikotomi asal-usul kepemimpinan pesantren dengan memadukan teori kepemimpinan “pemimpin dilahirkan” dan teori kepemimpinan “pemimpin dibentuk” Betapa pun seseorang memiliki bakat besar menjadi pemimpin, apabila ia tidak memiliki kesempatan menerapkan bakat tersebut serta tidak didukung oleh pengetahuan teoritikal, mungkin saja orang tersebut menjadi pemimpin, tetapi ia tidak menjadi pemimpin yang efektif. Bakat hanyalah modal. Modal yang tidak berkembang, maka lambat laun akan berkurang, bahkan habis. Bakat kepemimpinan sebagai modal berorganisasi yang tidak dikembangkan akan kehilangan maknanya secara perlahan-lahan. Pola kepemimpinan karismatik yang menurut paradigma kepemimpinan modern sudah kurang cocok untuk diterapkan pada era modern sekarang ini, oleh Abdurrahman Wahid telah dicarikan solusinya

⁴³ Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 36.

yaitu dengan jalan mengadakan pelatihan kepemimpinan di lembaga-lembaga pesantren, sehingga kelemahan yang terjadi pada pesantren selama ini, dengan sukarnya mereka mencari pengganti pemimpin (kiai pengasuh) sudah terantisipasi sejak awal. Pada akhirnya keberlangsungan pendidikan pesantren akan terus terjaga dengan adanya pimpinan baru yang telah dipersiapkan sebelumnya. Walaupun demikian, kepemimpinan model karismatik, menurut Abdurrahman Wahid masih tetap dibutuhkan di dalam masyarakat yang masih tradisional seperti di Indonesia ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas Gus Dur memang tidak menjelaskan model kepemimpinan kolektif, namun mempertahankan model kepemimpinan individual kiai yang berkarakter khas karismatik tapi dengan catatan adanya penyiapan pemimpin yang memiliki manajerial dan keilmuan tentang kepemimpinan yang baik.

Penulis berpendapat selain kepemimpinan individual kiai hal yang juga sangat perlu adalah adanya kepemimpinan kolektif yayasan. Apalagi realitanya didalam pesantren terdapat madrasah maupun sekolah yang masing-masing ada pemimpinnya. Agar terjadi kepemimpinan pesantren yang demokratis, tetapi kenyataannya masih belum memberikan kebebasan kepada guru / ustadz untuk menentukan pilihannya sendiri teruma menyangkut pergantian kepala madrasah / sekolah misalnya maka uji coba kepemimpinan kolektif yayasan sangat urgen dilaksanakan dalam kontek pengembangan pondok pesantren yang semakin kompleks.

E. Fungsi Pesantren

Urgensi dinamisasi fungsi tradisional pesantren adalah untuk menjawab dinamika perkembangan orang tua wali dan dinamika perkembangan konstelasi global yang menghendaki lembaga pendidikan tidak mempelajari dan berkuat pada persoalan-persoalan ilmu teoritis belaka dan menghasilkan kecerdasan verbal namun harus lebih jauh melihat kebutuhan dunia kerja yang pada waktunya akan bermanfaat bagi santri saat lulus dari pesantren karena telah dibekali dengan berbagai keterampilan *soft skill*. fungsi tradisional pesantren awal yang hanya focus pada ilmu-ilmu teoritis dan orientasi akhirat akibat

gejala pemahaman dikotomi ilmu perlu untuk mendapatkan pemahaman ulang. Dalam hal ini Gus Dur mengatakan Menjadikan pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat saat ini memang kurang mendapat perhatian mendalam dari dalam kalangan pesantren sendiri. Hal ini, disebabkan karena pendidikan pesantren masih berorientasi pada pengembangan ilmu agama secara teoretis, sehingga orientasi pada penyiapan santri (peserta didik) yang dapat menjadi pelopor dalam upaya pemberdayaan masyarakat masih minim (untuk tidak mengatakan belum ada sama sekali).⁴⁴

Langkah yang perlu diambil antara lain, menurut Gus Dur, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan dan membuat lembaga 'sekolah umum' di lingkungan pesantren. Hanya saja, menurut Gus Dur, diperlukan adanya pencegahan terhadap kemungkinan munculnya intelektualisme yang dangkal yang disebabkan oleh elitisasi watak pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat dicegah arus semakin deras untuk menciptakan intelektualisme dangkal yang bersifat verbalistis di pesantren, yang merupakan akibat utama elitisasi watak pendidikan itu.

Karena uatu lembaga pendidikan akan berhasil menyelenggarakan kegiatannya jika ia dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam kehidupan masyarakat yang melingkarinya. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kecocokan nilai antara lembaga pendidikan yang bersangkutan dan masyarakatnya, setidaknya tidak bertentangan. Lebih dari itu, suatu lembaga pendidikan akan diminati oleh anak-anak, orang tua, dan seluruh masyarakat apabila ia mampu memenuhi kebutuhan mereka akan kemampuan ilmu dan teknologi untuk menguasai suatu bidang kehidupan tertentu, dan kemampuan moral keagamaan dan moral sosial budaya untuk menempatkan diri mereka ditengah-tengah pergaulan bersama sebagai manusia terhormat.⁴⁵

Penjelasan ini memberikan merupakan upaya *preventif* terhadap beberapa pesantren yang melakukan pembaharuan namun terhenti dalam tataran teknis, yang terkesan hanya menempatkan santri sebagai objek 'peradaban

⁴⁴ Rohani, *Dinamisasi Pendidikan Pesantren*, dalam Jurnal al-Qalam Vol XIII, 2011, hlm. 107

⁴⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta : INIS, 1994), hlm. 4-5

teknis' dari pembangunan, dalam artian kesadaran nilai dan sistem keagamaan dan dinamisasi sosialnya belum bisa menjiwai pola pendidikan non-keagamaan. Hal ini penting sekali disadari bersama, karena secara sistematis, pendidikan tidak dapat dipahami secara parsial yang dapat mengakibatkan permasalahan baru bagi umat Islam. Demikian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, jika pendidikan Islam dan umum dipahami secara parsial. Karenanya pendidikan Islam harus dipahami secara komprehensif dan integratif, keseimbangan antara kebutuhan jasmaniah dan lahiriyah, ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi semuanya dalam konteks ibadah kepada Allah.